

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilihan Umum 2024 bukan semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal seperti persaingan antarpartai atau perubahan perilaku pemilih, melainkan berkaitan erat dengan krisis internal dalam tubuh partai itu sendiri. Dalam konteks pelembagaan partai, PPP mengalami kemunduran pada hampir seluruh dimensi yang menjadi indikator pelembagaan yang sehat dan berfungsi.

Aspek yang paling krusial terlihat pada lemahnya *value infusion*, yaitu kegagalan partai dalam mempertahankan dan menanamkan nilai-nilai ideologis secara konsisten, baik dalam kebijakan maupun dalam perilaku elitnya. Identitas sebagai partai Islam yang seharusnya menjadi kekuatan utama PPP justru kabur akibat pilihan politik yang pragmatis, program-program yang tidak lagi berbasis nilai, serta perilaku elit yang kerap bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang dijunjung oleh partai.

Masalah ini kemudian diperparah dengan lemahnya sistem internal atau *systemness*. Tidak berjalannya proses kaderisasi yang berkesinambungan, serta terpinggirkannya kader-kader ideologis oleh kepentingan kelompok tertentu, memperlihatkan bahwa PPP mengalami disfungsi struktural yang serius. Hal ini berdampak langsung pada ketidakmampuan partai dalam menjaga kesinambungan nilai, regenerasi kepemimpinan, dan konsolidasi organisasi, terutama di tingkat akar rumput.

Secara eksternal, PPP juga menghadapi krisis dalam hal *reification*, yaitu bagaimana partai dipersepsi dan diterima oleh publik. Citra partai sebagai representasi aspirasi umat Islam perlahan luntur akibat ketidaksesuaian antara simbol-simbol keagamaan yang digunakan dengan praktik politik yang

dijalankan. Akibatnya, sebagian kader dan pemilih mulai merasa kehilangan kebanggaan terhadap identitas partai.

Selain itu, rendahnya tingkat *autonomy* atau kemandirian politik PPP juga menjadi faktor yang memperparah krisis internal. Ketergantungan terhadap kekuasaan, minimnya keberanian untuk bersikap mandiri dalam menentukan arah politik, serta maraknya praktik politik transaksional telah mengikis independensi partai dan membuat PPP kehilangan kepercayaan dari sebagian basis pendukungnya.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan suara PPP merupakan konsekuensi dari krisis pelembagaan yang bersifat menyeluruh dan saling berkaitan. Ketika nilai tidak lagi menjadi fondasi gerak partai, struktur internal melemah, citra publik merosot, dan kemandirian politik hilang, maka kekuatan elektoral pun akan turut terdampak secara signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelembagaan partai bukan hanya soal struktur formal atau usia partai, melainkan tentang seberapa dalam nilai dan komitmen dijalankan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis merekomendasikan sejumlah langkah strategis yang ditujukan langsung kepada pihak-pihak kunci di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai berikut:

1. Kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah ideologis dan orientasi politik partai. Ketum dan Sekjen sebagai nahkoda utama harus memimpin konsolidasi nilai, memperkuat kembali komitmen terhadap isu-isu keumatan yang menjadi jati diri PPP, serta memastikan bahwa partai tidak kehilangan akar ideologisnya demi kepentingan pragmatis jangka pendek.
2. Kepada Bidang Kaderisasi DPP PPP, reformasi sistem kaderisasi dan rekrutmen kader menjadi kebutuhan mendesak. Kader-kader muda dan ideologis harus diberi ruang tampil dalam posisi strategis, bukan

dimarginalkan. Perlu disusun mekanisme kaderisasi yang terukur, berjenjang, dan berbasis kompetensi serta loyalitas terhadap nilai partai.

3. Kepada DPW dan DPC PPP di seluruh Indonesia, penguatan struktur organisasi di tingkat bawah harus menjadi agenda prioritas. DPW dan DPC memiliki tanggung jawab langsung untuk membina kader di tingkat PAC dan ranting agar nilai dan visi partai benar-benar mengakar sampai ke tingkat akar rumput. Perhatian terhadap kompetensi kader lokal juga harus diperkuat untuk menghindari degradasi kualitas kepemimpinan di lapangan.
4. Kepada Departemen Komunikasi dan Pencitraan Partai (Media Center), perlu ada strategi komunikasi yang konsisten dan terencana untuk membangun kembali citra publik partai. Upaya reifikasi yakni membentuk kembali PPP sebagai simbol politik yang relevan dan dipercaya publik harus menjadi agenda komunikasi jangka panjang. Narasi tentang warisan keulamaan, pesantren, dan keberpihakan terhadap umat harus dikemas secara modern dan kontekstual.
5. Kepada seluruh elemen pimpinan partai, dari pusat hingga daerah: Penting untuk memperluas peran partai dalam pendidikan politik masyarakat. Melalui forum keumatan, kegiatan sosial, hingga pelatihan kader, PPP harus mendorong pemilih agar lebih kritis dan terhubung secara nilai dengan partai. Ini menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga basis dukungan sekaligus memperkuat pelembagaan partai dalam lanskap demokrasi elektoral.

Dengan langkah-langkah ini, PPP memiliki peluang untuk memperbaiki kelemahan struktural dan simboliknya, sekaligus memperkuat kembali posisinya dalam kontestasi politik nasional ke depan.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, baik secara teoretis maupun praktis.